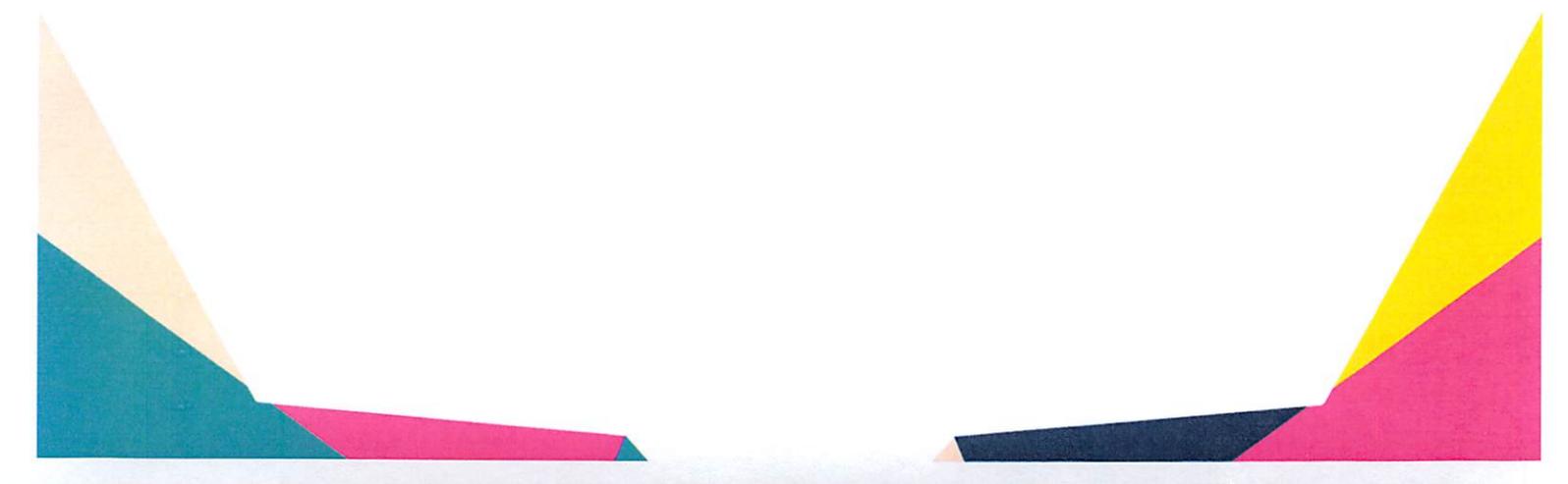




**TAHUN
2019**

**LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN
KERJA KABINET**



KATA PENGANTAR

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang baik akan menghasilkan pelayanan yang prima. Reformasi birokrasi merupakan suatu proses perubahan dalam proses birokrasi suatu pemerintahan. Sekretariat Kabinet sangat mengedepankan proses reformasi birokrasi dalam setiap kegiatan, baik dalam menjalankan fungsi dukungan kepada manajemen kabinet maupun internal Sekretariat Kabinet.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, Sekretariat Kabinet memandang bahwa pemangku kepentingan Sekretariat Kabinet memegang peranan penting dalam menjamin keberhasilan reformasi birokrasi suatu pemerintahan. Masukan dan saran dari pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh Sekretariat Kabinet untuk menjamin pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana dalam menyampaikan aspirasi pemangku kepentingan Sekretariat Kabinet.

Forum Konsultasi Publik telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Di dalam PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 tersebut, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal itu, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dalam bentuk rapat koordinasi guna memperoleh masukan dari pemangku kepentingan Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet terkait dengan pelayanan yang diberikan serta mengelola dan menindaklanjutinya.

Jakarta, September 2020
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet,



Thanon Aria Dewangga

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK.....	4
2.1. Pra Pelaksanaan	4
2.2. Pelaksanaan.....	8
2.3. Pasca Pelaksanaan.....	16
BAB III PENUTUP	17
3.1. Kesimpulan	17
3.2. Rekomendasi.....	17
LAMPIRAN.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Forum Konsultasi Publik Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dilaksanakan guna memperoleh keselarasan pemahaman tujuan, pembahasan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, pembahasan dampak kebijakan serta evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai penyelenggara pelayanan publik telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik melalui Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan.

1.2. Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Sekretariat Kabinet Tahun 2019 yang direalisasikan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi

Publik tentang Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet; dan
- e. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud terselenggaranya Forum Konsultasi Publik Sekretariat Kabinet Tahun 2019 yang direalisasikan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ini adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas maupun pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sedangkan tujuan terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Memperoleh masukan dan saran dari pemangku kepentingan Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet terkait dengan pelayanan publik yang diberikan.
2. Mengelola dan menindaklanjuti masukan dan saran dari pemangku kepentingan Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet terkait dengan pelayanan publik yang diberikan.

3. Sebagai fungsi *monitoring* dan evaluasi bagi Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB II

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2.1. Pra Pelaksanaan

a. Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, diawali dengan membentuk tim atau panitia Internal Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet *cq.* Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2019, yang diketuai oleh Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dan anggotanya terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

b. Tema Forum Konsultasi Publik

Tema Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

c. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas tiga hal besar yaitu :

1. Forum Konsultasi Publik terkait peningkatan kualitas pelayanan publik Sekretariat Kabinet dalam mendukung peningkatan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yaitu dalam pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet dan sinergi informasi persidangan kabinet;

2. Diskusi Panel tentang peningkatan pelayanan dalam rangka pengamanan informasi persidangan; dan
3. Survei Pelayanan Pengelolaan Sidang Kabinet.

d. Analisis Masalah

Reformasi Birokrasi merupakan segala upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan antara lain menyangkut aspek organisasi, ketatalaksanaan atau proses bisnis, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan disiplin dalam rangka mewujudkan *good governance*, peningkatan kinerja, pelayanan publik dan kepercayaan publik. Pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, pemerintah yang efektif dan efisien serta pemerintah yang mampu menyediakan pelayanan publik yang baik merupakan tujuan dari dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh instansi Pemerintah.

Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet selaku unit kerja yang menyelenggarakan sidang kabinet, rapat terbatas dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden juga melaksanakan reformasi birokrasi di segala bidang baik dalam kebijakan pelayanan, penguatan sumber daya manusia, pengelolaan pengaduan maupun inovasi. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet diharapkan memiliki sinergi informasi dengan pemangku kepentingan sidang kabinet dalam hal ini Menteri atau Kepala Lembaga dan Kepala Daerah sebagai pengguna informasi sidang kabinet.

Seluruh informasi yang dihasilkan dari kegiatan sidang kabinet, rapat terbatas dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dijaga keamanannya oleh seluruh instansi terkait. Oleh sebab itu, setiap pemangku kepentingan sidang kabinet dituntut untuk saling bersinergi dalam pengamanan informasi guna peningkatan kualitas penyelenggaraan sidang kabinet, mulai dari perencanaan jadwal dan agenda sidang kabinet, penyiapan undangan sidang kabinet, penyiapan perlengkapan sidang kabinet,

penyiapan bahan-bahan atau materi sidang kabinet, dan pemantauan dalam penyelenggaraan sidang kabinet.

Setelah penyelenggaraan sidang kabinet, hasil-hasil sidang kabinet berupa risalah dan arahan Presiden akan disampaikan kepada para peserta sidang kabinet guna ditindaklanjuti. Risalah dan Arahan Presiden merupakan dokumen Negara yang bersifat rahasia. Untuk menjaga kerahasiaan, terutama dalam keamanan bahan dan risalah sidang kabinet, dibutuhkan komitmen dari instansi terkait. Sehingga sinergi informasi persidangan antara Sekretariat Kabinet dengan Kementerian atau Lembaga Pemerintah serta Pemerintah Daerah dan Provinsi merupakan salah satu hal yang diusulkan oleh Presiden untuk ditindaklanjuti.

e. Bentuk Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

Bentuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah tatap muka dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

f. Pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik antara lain :

1. Media massa yaitu www.setkab.go.id.
2. Ahli/Praktisi yaitu Sdr. Teguh Wijanarko selaku Staf Ahli Bidang Budaya Kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sdr. Samuel Abrijani Pangerapan selaku perwakilan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sdr. Susilo Wibowo selaku Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Sdri. Endah Triastuti selaku Ketua Program Sarjana Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

3. Penyelenggara layanan yaitu Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
4. Pengguna layanan yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah serta Pemerintah Daerah dan Provinsi.
5. Pemangku kepentingan pelayanan publik yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Siber dan Sandi Negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

g. Jadwal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (*Run Down Acara*)

SUSUNAN ACARA
RAPAT KOORDINASI DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENGUATAN SINERGI INFORMASI PERSIDANGAN KABINET
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
TANGGAL 2 S.D. 4 MEI 2019 DI DEPOK, JAWA BARAT

TANGGAL	WAKTU	ACARA
Jumat, 3 Mei 2019	08.00	Pembukaan
	08.00 - 08.05	Menyanyikan Bersama Lagu <i>Indonesia Raya</i> dan <i>Mars Sekretariat Kabinet</i>
	08.05 - 08.10	Laporan Pelaksanaan dan Pembukaan Rakor dan FKP oleh Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
	08.10 - 08.15	Sambutan Wakil Walikota Depok
	08.15 - 08.20	Penyerahan Plakat dan Foto Bersama Wakil Walikota Depok
	08.20 - 08.30	Pembacaan Doa
	08.30 - 11.00	Forum Konsultasi Publik - Staf Ahli Bidang Budaya Kerja, Menteri PAN dan RB (Drs. Teguh Wijanarko, MPA) - Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dyah Pancaningrum) - Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan (Sjahriati Rochmah) Survei
	11.00 - 11.30	Penyerahan Plakat dan Foto Bersama para Narasumber
	12.00 - 14.00	Istirahat, Shalat Jumat dan Makan Siang
	14.00 - 14.10	Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh Deputi DKK
	14.10 - 17.00	Panel (para Narasumber) dan Diskusi: - Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet (Yuli Harsono) - Sekretaris Ditjend Aplikasi Informatika, Kominfo (Sadjan) - Kepala Biro Hukum dan Humas, BSSN (YB Susilo Wibowo) - Ketua Program Sarjana Reguler FISIP UI (Endah Triastuti)
	17.00 - 17.10	Ucapan Terima kasih Bapak Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sekaligus Penyerahan Plakat dan Foto Bersama Panelis
	17.10 - 17.20	Pengumpulan hasil survei
17.20 - 17.30	Penutup	
17.30 - 18.00	Ramah Tamah	

2.2. Pelaksanaan

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 di Depok, Jawa Barat.

b. Hasil Pembahasan Forum Konsultasi Publik

JANJI PERBAIKAN LAYANAN TAHUN 2018

Berdasarkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik yang ditandatangani Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada tanggal 10 Desember 2018, Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet berjanji akan melakukan perbaikan pelayanan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet yang lebih efektif dan efisien (pelayanan prima) dengan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja terkait;
2. Penyempurnaan Standar Pelayanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
3. Pembangunan Sistem Informasi Penjadwalan Sidang Kabinet; dan
4. Menindaklanjuti kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dengan pengamanan informasi penyelenggaraan sidang kabinet.

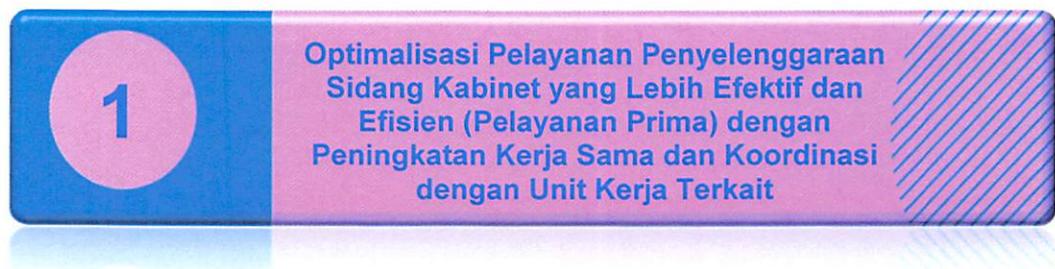
Dalam rangka optimalisasi pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet yang lebih efektif dan efisien (pelayanan prima), Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melakukan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Sekretariat Negara dalam peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas pada tahun 2019.

Kemudian guna peningkatan pelayanan dalam permohonan penjadwalan sidang kabinet serta pengkinian informasi dalam standar pelayanan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah melakukan penyempurnaan Standar Pelayanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet dengan menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Nomor:Kep.26/DKK/IX/2019 tentang Standar Pelayanan pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Standar pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet dapat menjadi acuan bagi pemohon dalam mengajukan permohonan penjadwalan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Serta merupakan pedoman bagi penyelenggara pelayanan.

Teknologi informasi juga digunakan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam meningkatkan pelayanan pada permohonan penjadwalan sidang kabinet yaitu dengan membangun Sistem Informasi Usulan Agenda Persidangan. Sistem Informasi Usulan Agenda Persidangan merupakan suatu aplikasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk memonitor perkembangan dan status usulan sidang kabinet/rapat terbatas. Hal ini sangat dibutuhkan guna kecepatan dan ketepatan informasi mengenai agenda penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas maupun pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain peningkatan dalam penyelenggaraan sidang kabinet, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet juga melakukan peningkatan dalam pengamanan informasi persidangan yaitu bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam rangka pengamanan informasi penyelenggaraan sidang kabinet rapat terbatas maupun pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet telah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Badan Siber dan Sandi Negara yang dimulai sejak Maret 2016 hingga Juni 2019.



Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat optimal dalam pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet yaitu dengan

melakukan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja terkait. Koordinasi dan kerja sama yang sinergi perlu dilakukan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada seluruh kegiatan mulai dari perencanaan jadwal dan agenda sidang kabinet, penyiapan undangan sidang kabinet, penyiapan perlengkapan sidang kabinet, penyiapan bahan-bahan atau materi sidang kabinet, pemantauan dalam penyelenggaraan sidang kabinet, dan pengelolaan risalah sidang kabinet.

Pada tahun 2019, Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi yang menghasilkan penandatanganan MoU atau perjanjian kerja sama antara Sekretariat Kabinet dengan Sekretariat Presiden dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan melakukan pengadaan peralatan berbasis teknologi digital yang mendukung cara kerja tanpa menggunakan kertas (*paperless*). MoU ini ditandatangani oleh perwakilan Sekretariat Presiden dan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet selaku perwakilan dari Sekretariat Kabinet.

Peralatan dimaksud merupakan suatu alat dukung dalam penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas yang berfungsi untuk melakukan perekaman dinamika jalannya sidang kabinet/rapat terbatas baik secara audio maupun secara visual serta penayangan bahan paparan untuk setiap peserta sidang kabinet/rapat terbatas.



Berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, salah satu standar pelayanan Sekretariat Kabinet yaitu standar pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam rangka merespon dinamika yang berkembang dan menjamin terselenggaranya kinerja pelayanan berkualitas yang dilakukan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah melakukan *monitoring* dan evaluasi standar pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada tahun 2019.

Standar pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet yang telah dievaluasi selanjutnya disempurnakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Pada PermenPAN-RB 15 tahun 2014 tersebut, standar pelayanan yang baik harus memiliki seluruh komponen standar pelayanan. Komponen standar pelayanan dibagi kedalam dua bagian yaitu komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

Komponen *service delivery* meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Sedangkan komponen *manufacturing* meliputi dasar hukum, sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana.

Standar pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet yang telah disempurnakan kemudian ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Nomor Kep.26/DKK/IX/2019 tentang Standar Pelayanan pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Pada Keputusan Deputi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dimaksud, Standar Pelayanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet sudah memenuhi seluruh komponen yang ada pada Permenpan-RB 15 tahun 2014. Adapun langkah selanjutnya yang akan dilakukan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah menyempurnakan Keputusan Sekretaris

Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet.



Penjadwalan atau agenda sidang kabinet merupakan salah satu pelayanan publik Sekretariat Kabinet khususnya pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Guna meningkatkan pelayanan kepada publik, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet membangun pelayanan yang berbasis teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi usulan agenda persidangan. Sistem informasi usulan agenda persidangan merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk optimalisasi efektivitas dalam pengelolaan agenda persidangan serta memberikan kecepatan dan kemudahan bagi para pemangku kepentingan guna mendapatkan informasi usulan sidang kabinet, rapat terbatas maupun pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sistem informasi usulan agenda persidangan memberikan manfaat baik bagi penyelenggara sidang kabinet yaitu Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet *cq.* Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan maupun bagi pemangku kepentingan yaitu Kementerian/Lembaga yang mengirimkan permohonan usulan sidang kabinet/rapat terbatas, guna memonitor perkembangan dan status usulan sidang kabinet, rapat terbatas maupun pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sistem informasi usulan agenda persidangan dibangun dalam 2 (dua) metode yaitu metode *offline* dan metode *online*. Metode *offline* hanya bisa diakses oleh Administrator pada aplikasi berbasis java desktop yang berada pada server Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet. Sedangkan metode *online* dapat diakses oleh *stakeholders* pada aplikasi berbasis *website*. *Website* untuk sistem informasi merupakan sub domain dari alamat setkab.go.id. Setiap

stakeholder akan memperoleh *account* masing-masing yang berisi *username* dan *password*. Berikut ini tampilan dari sistem informasi usulan agenda persidangan.

NAMA PENGUSUL	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	USULAN TOPIK	DIUSULKAN	DIRATASKAN
ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN					
MENTERI PERTAHANAN	B/347/M/2019	2019-02-21	Pemohonan Penjadwalan	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
DEPUTI BIDANG PEREKON	M.125/Ekon/2019	2019-02-18	Pemohonan Penjadwalan	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
DEPUTI BIDANG PEREKON	M.120/Ekon/2019	2019-02-15	Pemohonan untuk Mengag	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
MENTERI SEKRETARIS NE	B-201/M. SersepegD-1/19K.00	2019-02-15	Pemohonan Rapat Tertot	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
MENTERI KEUANGAN	S-130/MK.01/2019	2019-02-14	Pemohonan Penjadwalan	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
MENTERI PERENCANAAN	B.0930/P/19/2019/01.0	2019-02-13	Pemohonan Sidang Kabin	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
MENTERI PEMUDA DAN OL	S.2.4.2/MENFORAD.8/2019	2019-02-04	Laporan Perkembangan Pe	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
DEPUTI BIDANG KEMARTI	M.60/Martev/1/2019	2019-01-25	Usulan Topik Sidang Kabin	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
DEPUTI BIDANG PEREKON	M.69/Ekon/1/2019	2019-01-25	Usulan Sidang Kabin/Rap	Sudah Diusulkan	Belum Dirataskan
DEPUTI BIDANG PEREKON	M.62/Ekon/1/2019	2019-01-23	Penyampaian Bahan Rapat	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
DEPUTI BIDANG PEREKON	M.61/Ekon/1/2019	2019-01-23	Penyampaian Bahan Rapat	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
DEPUTI BIDANG PEREKON	M.60/Ekon/1/2019	2019-01-23	Penyampaian Bahan Perte	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
SEKRETARIS KABINET	M.72	2019-01-22	Perkembangan Pembahasa	Sudah Diusulkan	Belum Dirataskan
DEPUTI BIDANG PEREKON	M.47/Ekon/1/2019	2019-01-21	Perkembangan Pembahasa	Sudah Diusulkan	Belum Dirataskan
DEPUTI BIDANG KEMARTI	M.15/Martem/1/2019	2019-01-11	Usulan Pelaksanaan Rapat	Sudah Diusulkan	Belum Dirataskan
KOMITE KEBUKHAHAN INDI	B/1501/02/2019/03P	2019-01-07	Laporan Rapat Pleno KKP	Sudah Diusulkan	Belum Dirataskan
KEPALA BIDANG KOORDI	1A.1/2019	2019-01-04	Status Investasi Amazon W	Sudah Diusulkan	Belum Dirataskan
MENTERI SEKRETARIS NE	B-1109/M. SersepegD-1/19K.0	2018-12-27	Pemohonan Rapat Terbata	Sudah Diusulkan	Sudah Dirataskan
KOMITE KEBUKHAHAN INDI	B/57001/02/2019/03P	2018-12-14	Pemohonan Waktu Sidang	Sudah Diusulkan	Belum Dirataskan
ASISTEN DEPUTI BIDANG	M.845/Dkk-2/11/2018	2018-11-26	Usulan Penjadwalan Rapat	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
MENTERI ENERGI DAN SU	30844/0/EMM/G/2018	2018-11-05	Pemohonan Ratas terkait	Sudah Diusulkan	Sudah Dirataskan
MENTERI ENERGI DAN SU	30811/20/EMM/G/2018	2018-11-01	Pemohonan Ratas Rancan	Sudah Diusulkan	Sudah Dirataskan
ASISTEN DEPUTI BIDANG	M.703/Dkk-2/10/2018	2018-10-24	Arahan Presiden pada Rap	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
ASISTEN DEPUTI BIDANG	M.704/Dkk-2/10/2018	2018-10-24	Usulan Penjadwalan Rapat	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
MENTERI KEUANGAN	S-788/MK.01/2018	2018-10-22	Pemohonan Waktu Rapat	Belum Diusulkan	Sudah Dirataskan
DEPUTI BIDANG POLITIK	M.0689/Polhukam/10/2018	2018-10-18	Upraya Pengusahaan Teknol	Belum Diusulkan	Belum Dirataskan
DEPUTI BIDANG PEREKON	M.751/Ekon/10/2018	2018-10-15	Usulan Rapat Tertatas unt	Sudah Diusulkan	Sudah Dirataskan
MENTERI HELAUFAH DAN	B-670/MEH/19/2018	2018-10-09	Pemohonan Rapat Tertot	Sudah Diusulkan	Sudah Dirataskan
MENTERI LINGKUNGAN HD	S.325/MENLUK/SET/2018	2018-10-09	Usul Rapat Terbatas Kabin	Sudah Diusulkan	Sudah Dirataskan
DEPUTI BIDANG KEMARTI	M.392/Martev/10/2018	2018-10-05	Laporan Pelaksanaan Sida	Sudah Diusulkan	Belum Dirataskan
SEKRETARIS KABINET	M.1138	2018-10-05	Usulan Penyempozaraan Si	Sudah Diusulkan	Belum Dirataskan

Gambar 2. Tampilan Aplikasi *Offline* Sistem Informasi Usulan Agenda Persidangan



Gambar 2. Tampilan *Website* Sistem Informasi Usulan Agenda Persidangan

No.	Asal Surat	Nomor Surat	Tanggal Surat	Usulan Topik	Konfirmasi Usulan	Konfirmasi Ratas
1	MENTERI KEUANGAN	S-130MK/01/2019	2019-02-14	Pemohonan Penjadwalan Sidang Kabinet Pempurna	Bekas Diusulkan	Bekas Ditetapkan
2	MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS	B.093M.PP/NS/SESHM/01/01/02/2019	2019-02-13	Pemohonan Sidang Kabinet Pempurna Rancangan Prioritas Pembangunan 2020	Bekas Diusulkan	Bekas Ditetapkan
3	DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN SEKRETARIAT KABINET	M.50Mantani/1/2019	2019-01-25	Usulan Topik Sidang Kabinet: Evaluasi Capaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Ruang Laut, Penyelesaian Penumpukan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan dan Evaluasi Satgas 115, Sistem Logistik Ikan Nasional, Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, Reklamasi Pasca Tambang, Evaluasi Percepatan Program Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PLT3a), Peningkatan Investasi EBT di Indonesia terutama bagi Pelaku Usaha EET Skala kecil < 10MW, Peningkatan Keamanan dan keselamatan Transportasi, Optimalisasi Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Kemaritiman Melalui Evaluasi Pelaksanaan Program Tol Laut dan Jembatan Udara, Pengembangan Sektor Kuliner di Luar Negeri, Penguatan Ekonomi Kreatif untuk Mendukung Sektor Pariwisata	Bekas Diusulkan	Bekas Ditetapkan
4	DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET	M.69Ekoni/1/2019	2019-01-25	Usulan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Bidang Perekonomian Periode Semester 1 Tahun 2019: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Peningkatan Akses dan Penambahan Skema Kredit Usaha Rakyat, Perbaikan Peningkat Entry of Doing Business (EoDB), Percepatan pelaksanaan Mandatory Biodesisel B20, Perbaikan Defisit Neraca Transaksi Berjalan (CAD)	Sudah Diusulkan	Bekas Ditetapkan

Gambar 3. Tampilan Beranda Website Sistem Informasi Usulan Agenda Persidangan

4 **Menindaklanjuti Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dengan Pengamanan Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet**

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melakukan pengamanan informasi terkait penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui kerjasama dengan pihak Badan Siber dan Sandi Negara. Pengkajian kerjasama dengan BSSN dimulai pada tahun 2016.

Kerjasama yang dilakukan adalah dalam pengadaan *secure chat*. *Secure chat* dibangun atas kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam hal penyediaan infrastruktur. Sedangkan *secure email* yang digunakan adalah *email domain* resmi sekretariat kabinet setkab.go.id. *Secure email* yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet dan telah diimplementasikan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Kerjasama dengan pihak BSSN dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

Secure chat merupakan fitur komunikasi hasil kerjasama antara Sekretariat Kabinet dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan terkait dengan informasi dan transaksi elektronik di lingkungan Sekretariat Kabinet yang berguna untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan sidang kabinet. Nota Kesepahaman perlu dibuat agar melekatkan kerjasama dan untuk selanjutnya setiap pihak diharuskan untuk melaksanakan nota kesepahaman menjadi Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan mengikat. Nota Kesepahaman masih dalam proses pengkajian oleh Sekretariat Kabinet terkait pihak yang akan menandatangani nota kesepahaman tersebut.

2. Sosialisasi kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah

Pada tanggal 10 Desember 2018 di Ruang Rapat Sekretaris Kabinet telah dilaksanakan Sosialisasi penggunaan *secure chat* kepada perwakilan 12 (dua belas) Kementerian dan Lembaga Pemerintah. BSSN akan memfasilitasi perangkat telekomunikasi *secure chat* kepada seluruh Kementerian/Lembaga setelah terbitnya MoU antara Sekretariat Kabinet dengan BSSN.

3. Implementasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Pada tahun 2019, *secure chat* atas hasil kerjasama dengan BSSN diimplementasikan di lingkungan Sekretariat Kabinet. *Secure chat* dimanfaatkan oleh internal Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam peningkatan pelayanan terkait penyelenggaraan sidang kabinet.

2.3. Pasca Pelaksanaan

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, diakhiri dengan membuat janji perbaikan layanan dalam bentuk Berita Acara sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2019 menyimpulkan terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan unit terkait telah dilaksanakan guna optimalisasi pelayanan publik Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
2. Penyempurnaan standar pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet telah dilaksanakan guna peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
3. Peningkatan pelayanan publik terkait penjadwalan sidang kabinet dengan membangun teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Usulan Agenda Persidangan telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

3.2. Rekomendasi

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2019, rekomendasi yang dihasilkan adalah janji perbaikan pelayanan publik sebagai berikut :

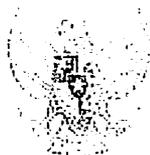
1. Optimalisasi pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet yang lebih efektif dan efisien (pelayanan prima) dengan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja terkait;
2. Peningkatan kesadaran keamanan dan dampak penyebaran informasi persidangan kabinet bagi seluruh pelaksana penyelenggaraan Sidang Kabinet di Sekretariat Kabinet serta mitra kerjanya;
3. Pemanfaatan layanan Pemerintah guna mendukung pengamanan informasi persidangan kabinet antara lain melakukan kerja sama dengan

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); dan

4. Implementasi Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2019 terkait Optimalisasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet agar lebih efektif dan efisien.

LAMPIRAN

Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik



BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pada hari ini, tanggal 3 bulan Mei tahun 2019, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah mengadakan Forum Konsultasi Publik dengan Para Pihak Terkait guna membahas permasalahan di bidang pelayanan publik terkait optimalisasi penyelenggaraan Sidang Kabinet, dengan hasil Unit Layanan berjanji akan melakukan perbaikan pelayanan dalam hal:

1. Optimalisasi pelayanan penyelenggaraan Sidang Kabinet yang lebih efektif dan efisien (pelayanan prima) dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja terkait.
2. Peningkatan kesadaran keamanan dan dampak penyebaran informasi persidangan kabinet bagi seluruh pelaksana penyelenggaraan Sidang Kabinet di Sekretariat Kabinet serta mitra kerjanya.
3. Pemanfaatan layanan Pemerintah guna mendukung pengamanan informasi persidangan kabinet antara lain melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4. Implementasi Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2019 terkait Optimalisasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet agar lebih efektif dan efisien.

Depok, 3 Mei 2019

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

**LAPORAN KEGIATAN
MENYELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI
DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PENGUATAN SINERGI INFORMASI
PERSIDANGAN KABINET DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN
PEMERINTAH DAERAH
TANGGAL 2 S.D. 4 MEI 2019 DI HOTEL SAVERO DEPOK, JAWA BARAT**

I. DASAR PENUGASAN :

1. Surat Perintah Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet nomor: Sprint. 54/DKK/4/2019 tanggal 30 April 2019;
2. Surat Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPD/DKK-1/V/2019 tanggal 2 Mei 2019.

II. NAMA KEGIATAN

Menyelenggarakan rapat koordinasi dan forum konsultasi publik penguatan sinergi informasi persidangan kabinet di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada tanggal 2 s.d. 4 Mei 2019 bertempat di hotel Saverio Depok, Jawa Barat.

III. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan persetujuan Sekretaris Kabinet serta program kerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, maka telah ditugaskan pejabat/pegawai untuk melakukan kegiatan menyelenggarakan rapat koordinasi dan forum konsultasi publik penguatan sinergi informasi persidangan kabinet di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada tanggal 2 s.d. 4 Mei 2019 di Hotel Saverio Depok, Jawa Barat.

IV. TARGET KEGIATAN

Terselenggaranya rapat koordinasi dan forum konsultasi publik penguatan sinergi informasi persidangan kabinet di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada tanggal 2 s.d. 4 Mei 2019 bertempat di hotel Saverio Depok, Jawa Barat.

V. PESERTA KEGIATAN

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan forum konsultasi publik penguatan sinergi informasi persidangan kabinet di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet serta dihadiri oleh para undangan yang merupakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (daftar peserta terlampir).

Foto Kegiatan



Daftar Hadir

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI Penguatan Kesadaran Keamanan Informasi Persidangan Kabinet
di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
pada Tanggal 2 s.d 4 Mei 2019 di Depok Jawa Barat

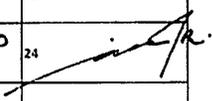
NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
1	KORAL DWARAKAL	KABAG PROTOKOL	PEMERINTAH PROVINSI ACEH	II/a	0811680950	
2			PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA			
3			PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT			
4	CHRISTIAN S. M	Staff	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	III/a	08527699000	
5			PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
6	Jon Kenedi	PRD Lu.	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI		08136655539	
7	MEROJANISYAH	Kasi HAL	PEMERINTAH PROVINSI DI NGKULU		08790553203	
8	Iwan Gunawan	KERO PROTOKOL	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN		0811-7875027	
9			PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
10			PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG			

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI Penguatan Kesadaran Keamanan Informasi Persidangan Kabinet
di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
pada Tanggal 2 s.d 4 Mei 2019 di Depok Jawa Barat

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
11	Dyah Dalmanti	Kesbid. Fasilitas	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN		081515561090	
12	Andriyansyah	Kep. bid. Prj. Kal	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT		081202067759	
13			PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
14			PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH			
15			PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA			
16	Satriano	Hubungan Antar Lembaga	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR		081316979771	
17			PEMERINTAH PROVINSI BALI			
18			PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
19			PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
20	Endriana	Ad. Pengam.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		081346577775	

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI Penguatan Kesadaran Keamanan Informasi Persidangan Kabinet
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA TANGGAL 2 S.D 4 MEI 2019 DI DEPOK JAWA BARAT

No	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
21			PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT			21
22	H.M. ISTANLI	Kepala Biro Protokol Kalteng	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		08224447863	22 
23			PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			23
24	M. ARIEF RAHMAN	Protokol	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		082277121280	24 
25			PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO			25
26	Dantje Lambang	Mt. kas Protokol	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA		08124193646	26 
27			PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT			27
28			PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH			28
29			PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN			29
30			PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			30

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI Penguatan Kesadaran Keamanan Informasi Persidangan Kabinet
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA TANGGAL 2 S.D 4 MEI 2019 DI DEPOK JAWA BARAT

No	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
31			PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA			31
32			PEMERINTAH PROVINSI MALUKU			32
33	IVONNE RATULANGI	Protokol PB	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT		085254554289 rf.ivonne@yaho.com	33 
34	RINA SORO	KASUBAG ACARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA		0823-995-91677	34 
35			PEMERINTAH KOTA MAGELANG			35
36			PEMERINTAH KOTA SERANG			36
37	Agus Daryanto	Pranata Humas	PEMERINTAH KOTA SOLO	II/A	081225563307	37 
38			PEMERINTAH KOTA BANDUNG			38
39			PEMERINTAH KOTA SURABAYA			39
40	ABDUL AZIZ	Kabag Humas & Protokol	PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN	IV/b	60149162239	40 

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI PENGUATAN KESADARAN KEAMANAN INFORMASI PERSIDANGAN KABINET
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA TANGGAL 2 S.D 4 MEI 2019 DI DEPOK JAWA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
41			PEMERINTAH KOTA BOGOR			41
42	<i>Djaffar</i>	<i>Kab. Bogor</i>	PEMERINTAH KOTA DEPOK			42 <i>[Signature]</i>
43			PEMERINTAH KOTA BEKASI			43
44			PEMERINTAH BUPATI GANYAR			44
45	<i>Pb. Banten</i>	<i>Kab. Serang Prov. Banten</i>	Prov. Banten		0852 805 7802	45 <i>[Signature]</i>
46						46
47						47
48						48
49						49
50						50

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI PENGUATAN KESADARAN KEAMANAN INFORMASI PERSIDANGAN KABINET
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA TANGGAL 2 S.D 4 MEI 2019 DI DEPOK JAWA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
41	<i>Sekretaris A. Bandung</i>	<i>KABUPATEN</i>	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			41 <i>[Signature]</i>
42	<i>Y.B. Sisilo Wibawa</i>	<i>KEMENTERIAN</i>	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA			42 <i>[Signature]</i>
43	<i>Endang Triastuti</i>	<i>KEMENTERIAN</i>	UNIVERSITAS INDONESIA			43 <i>[Signature]</i>
44						44
45						45
46						46
47						47
48						48
49						49
50						50

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
11	Yud Satri A	Protokol	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKM	08121207020 yud.satri@kpk.go.id	
12	Sahra Adhiva	Protokol	KEMENTERIAN KEUANGAN	081281303666 sahra.adhiva@kemendagri.go.id	
13			KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
14			KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI		
15	Dwi Meliyanti	Protokol	KEMENTERIAN KESEHATAN	081288019828 dwi.meliyanti@kemkes.go.id	
16			KEMENTERIAN SOSIAL		
17			KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN		
18	Asep Suparna	Protokol	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	08521246526 asep.suparna@kemendag.go.id	
19			KEMENTERIAN PERDAGANGAN		
20			KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI PENGUATAN KESADARAN KEAMANAN INFORMASI PERSIDANGAN KABINET
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA TANGGAL 25.04 MEI 2019 DI DEPOK JAWA BARAT

REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KABINET

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
1			KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN		
2			KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		
3			KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN		
4	Sudrajat	Kasubag Protokol	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMAHIRAN	0811111130	
5	Hafid Hidayat	Protokol	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	08121551215	
6			KEPALA STAF KEPRESIDENAN		
7			KEMENTERIAN DALAM NEGERI		
8			KEMENTERIAN LUAR NEGERI		
9			KEMENTERIAN PERTAHANAN		
10	Eni Kusnanti	Protokol	KEMENTERIAN AGAMA	0818602255	

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI PENGUATAN KESADARAN KEAMANAN INFORMASI PERSIDANGAN KABINET
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA TANGGAL 25.04 MEI 2019 DI DEPOK JAWA BARAT

REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KABINET

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI Penguatan Kesadaran Keamanan Informasi Persidangan Kabinet
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA TANGGAL 2 S.D 4 MEI 2019 DI DEPOK JAWA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
21			KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			21
22	Wahyu Wahyudi	Protokole	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		0813604955	22
23	Sugri	Sesditjen Aptela	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			23
24	Ariwiz	Pranata Humas	KEMENTERIAN PERTANIAN		08203400477	24
25			KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			25
26			KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			26
27			KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI			27
28	Fandi Santiago	Kasubag Protokol	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN		082177990132	28
29			KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS			29
30			KEMENTERIAN PENYAYOGAAN APARATUR NEGARA DAN RB			30

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI Penguatan Kesadaran Keamanan Informasi Persidangan Kabinet
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA TANGGAL 2 S.D 4 MEI 2019 DI DEPOK JAWA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
31	ERWIN FAJRI	KASUBAG PROTOKOL	KEMENTERIAN BULUH	B/c	08125245796 erwin.fajrin@kbp.go.id	31
32			KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM			32
33	TRIASTADI SP	Staf PROTOKOL	KEMENTERIAN PARAWISATA		081294237305 (021) 3838956	33
34	Adnan	Protokol	KEMENTERIAN PEREMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		0879 113 7134	34
35	Medeline Veronica	Protokol	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA		0852 5669 6891	35
36			KEMENTERIAN KEJAKSAAN AGUNG			36
37			TENTARA NASIONAL INDONESIA			37
38			KEMENTERIAN KEPOLISIAN NEGARA RI			38
39	Didik Yulianto	Protokol Kasubag	BADAN INTELIJEN NEGARA		081381265591	39
40	Teguh W	SAIV Kasubag	KEMENTERIAN PENYAYOGAAN APARATUR NEGARA DAN RB		08543015101	40

DAFTAR HADIR NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT KOORDINASI Penguatan Kesadaran Keamanan Informasi Persidangan Kabinet
di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah
pada Tanggal 2 S.D 4 Mei 2019 di Depok Jawa Barat

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
1			BADAN PUSAT STATISTIK			1
2	Ukyuk W	Protokol	BADAN KOORDINASI PENYANAMAN MODAL	1	08233900308	2
3			BADAN NARKOTIKA NASIONAL			3
4	Eko Susanto	Protokol	BADAN SIBER DAN SANEH NEGARA	11	08599105369	4
5	Kemas Chandra F.	Protokol	BANK INDONESIA		0811 598 777	5
6	Dwari Moses	-H-	OTORITAS JASA KEUANGAN		0818 22 88 14	6
7			KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI			7
8			KOMISI PEMILIHAN UMUM			8
9	Ariep Rijil	Protokol	PERUM. BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)		081123258275	9
10	Taufik/Parbul	Protokol	DEWAN KEMERDEKAAN PEREKONOMIAN DAN BERUSAHA RAKYAT		08167182718	10

081315489898

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI Penguatan Kesadaran Keamanan Informasi Persidangan Kabinet
di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah
pada Tanggal 2 S.D 4 Mei 2019 di Depok Jawa Barat

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
1	Yuli Kuseno	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Sekretariat Kabinet			1
2	Haris (Saraswati)	Inspektur	Sekretariat Kabinet			2
3	Hendri Dam	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kabinet	W/C	0828727460	3
4	Dyah Pancaningrum	Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Kabinet	W/C	08568308194	4
5	Eko Harnoro	Asisten Deputi Bidang Masalah dan Terjemahan	Sekretariat Kabinet	W/C	08118875888	5
6	Jakowisnambro	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan Kabinet	Sekretariat Kabinet		081077092599	6
7	Sjahir Rachmah	Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Sekretariat Kabinet			7
8	Purnomo Sigit	Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara (PD Dep. Hukum)	Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan	W/C	081808104940	8
9	Parham	Asisten Deputi Bidang Perencanaan, Kewasusahan dan Keterlaksanaan (AD Dep. Perekonomian)	Deputi Bidang Perekonomian			9
10		Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Sastra dan Teknologi (AD Dep. PPK)	Deputi Bidang PPK			10

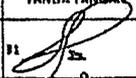
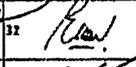
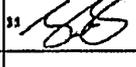
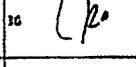
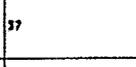
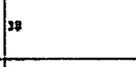
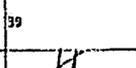
DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI PENGUATAN KESADARAN KEAMANAN INFORMASI PERSIDANGAN KABINET
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA TANGGAL 2 S.D 4 MEI 2019 DI DEPOK JAWA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
11	M. Arif Kurniawan	Asisten Deputi Bidang Regenerasi, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim (RD Dep. Kemaritiman)	Deputi Bidang Kemaritiman			11
12	Tarmizi	Kepala Bidang Protokol, Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			12
13	Ech Nurhidayanto	Kepala Bidang Pengelompokan Informasi, Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			13
14	Sumardi	Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pertengkapan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet		08567781964	14
15	Rudi Gemario	Kepala Bidang Penyusunan Bahan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet		085688805747	15
16	Enowesti Putra Santiaji	Kepala Bidang Perencanaan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			16
17	Hendroono Tragee	Kepala Subbidang Penyusunan Bahan pada Bidang Pelaksanaan dan PMA Persidangan, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			17
18	Mellia Widayawati	Kepala Subbidang Penyusunan Bahan pada Bidang Ekonomi dan Maritim, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			18
19	Wardaya	Kepala Subbidang Pelaksanaan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet		08138277696	19
20	Mulyana	Kepala Subbidang Pertengkapan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			20

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI PENGUATAN KESADARAN KEAMANAN INFORMASI PERSIDANGAN KABINET
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA TANGGAL 2 S.D 4 MEI 2019 DI DEPOK JAWA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GOL	NO. TELP/EMAIL	TANDA TANGAN
21	Denny Binsar Mangili	Kepala Subbidang Pengelompokan Informasi, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	III/b	081340265287	21
22	Prasasti A. Nugraha	Kepala Subbidang Perencanaan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			22
23	Emmie Puatikan	Kepala Subbidang Perencanaan Persidangan, Kepala Bina Administrasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Deputi Bidang Administrasi			23
24	Nurita	Kepala Subbidang Perekaman Audio dan Visual Persidangan, Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			24
25	A. A. Alimuddin	Kepala Subbidang Perumahan Digital/Komputer Republik Indonesia, Asisten Deputi Bidang Rumah dan Terjemahan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			25
26	Sigit Purnama	Pengelola Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			26
27	Arif Nur Hafid	Pengolah Data	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			27
28	Rizan Nubia	Asisten Deputi dan Informan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	III/a	08581159484	28
29	Rani Anggraeni	Pengelola Persidangan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	III/a	085949900364	29
30	Indra Prakosa	Pengelola Terjemahan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	III/b	085694841293	30

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT KOORDINASI Penguatan Kesadaran Keamanan Informasi Persidangan Kabinet
di Lingkungan Kementerian/Lemdag dan Pemerintah Daerah
pada Tanggal 2 s.d 4 Mei 2019 di Depok Jawa Barat

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	GDI	NO. TELP/EMAI	TANDA TANGAN
31	Soenarto	Analisa Data dan Informatika	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet		0852 5796 3354	
32	Ridhina Hafidhulhikmah	Pengelola Data, Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokoler	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet		087212474134 Ridhina	
33	M. N. Usman	Analisa Data dan Informatika	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet		081266473000	
34	Ragus Hartawan	Pengadministrasian Umum	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			
35	Nata Vitellina	Tenaga Pelaksana, Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan Penyelenggaraan	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet		081210258748	
36	Ully Ayu Estel	Pegawai Tetap Tetap	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet		08211198102	
37	Ulun Mukas	Pegawai Tetap Tetap	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			
38	Abdulrahman Fauzi	Pegawai Tetap Tetap	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			
39	Samsulrizal	Pegawai Tetap Tetap	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet			
40	Tamanprat A. F. Kayhalu	Pegawai Tetap Tetap	Deputi Bidang Administrasi			